
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

Tahun Anggaran 2018

DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS SOSIAL

Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No. 12

Telp. (0536) 3221582 Fax. (0536) 3224185

PALANGKA RAYA 73112



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2018 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 ini dengan memperhatikan target dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Sosial terutama dalam rangka mengatasi dan menjangkau keseluruhan permasalahan sosial, terutama di daerah terpencil, mengingat situasi kondisi geografis sehingga belum terjangkau akses pelayanan sosial. Secara umum rencana kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah ini telah berupaya agar mampu memberdayakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Provinsi Kalimantan Tengah secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2018 ini disusun sebagai bahan Pengukuran Kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program dan Kegiatan Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial yang akan dilaksanakannya selama tahun 2018.

Demikian Rencana Kerja ini ini disusun, semoga bermanfaat bagi pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan terima kasih.

Palangka Raya, September 2017
Kepala Dinas,

Drs. SUHAEMI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640905 199303 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaannya lebih lanjut diatur ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dalam peraturan dimaksud diamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang disusun untuk periode tahunan dan merupakan pejabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD tahun 2016-2021 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, sehingga penyusunan Renja PD dilakukan secara simultan/paralel dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD.

Renja PD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah disusun agar dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama dalam tahun anggaran 2018 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian akan dapat memberikan gambaran tentang arah dan tujuan program, target kinerja yang akan dicapai serta kegiatan pelayanan sosial yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Renja PD merupakan proses awal dari penyusunan perencanaan program dan anggaran PD terkait dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018, sehingga program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renja PD akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2018.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan 34.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 PRPS Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1991 beserta protokol 1972.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Kesejahteraan Anak.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
15. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman.
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
21. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

25. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
26. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
27. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2025.
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah.
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2015.
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
34. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/213/2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Pembentukan Komisi Lanjut Usia Provinsi Kalimantan Tengah.
35. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/110/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Renja PD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan program tahun anggaran 2018, yang menjadi acuan dalam penyusunan anggaran.

2. Tujuan

- a. Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2018.
- b. Merencanakan target dan sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam tahun 2018.
- c. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 ini, disusun terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017, memuat Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2017.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, memuat rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dikaitkan dengan sasaran target kinerja.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN, memuat uraian tentang garis besar rekapitulasi program dan kegiatan serta faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran.

BAB II
RENJA PD TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017 dan Capaian Renstra PD

Pada tahun Anggaran 2017, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mengelola anggaran APBD untuk belanja langsung sebesar Rp.9.450.490.000,- (Sembilan milyar empat ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.802.036.659,- (Tiga belas milyar delapan ratus dua juta tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga jumlah pagu anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.23.197.526.659,00 (Dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah)

Penyerapan anggaran yang dicapai pada bulan April 2017 untuk belanja langsung sebesar Rp. 1.977.807.751,00 dengan Prosentase 20,93% sedangkan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.397.984.180,00 dengan prosentase 31,86%, sehingga secara keseluruhan penyerapan anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.6.375.791.931,00 dengan prosentase penyerapan keuangan 52,79% dan Realisasi Fisik sebesar 55,08%. Secara terperinci, penggunaan dana untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 , dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.902.687.000	521.995.927	27,43	28,80
1	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	13.750.000	2.040.000	14,84	30,00
2	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	382.414.250	143.730.827	37,59	38,00
3	<i>Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah</i>	10.450.000	-	-	-

4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	710.090.750	187.229.000	26,37	28,50
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	50.196.000	14.462.000	28,81	30,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	99.000.000	30.918.750	31,23	32,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	73.523.500	9.527.600	12,96	15,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75.000.000	14.906.850	19,88	20,00
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	100.000.000	-	-	-
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	47.300.000	3.745.000	7,92	10,00
11	Penyediaan makanan dan minuman	21.962.500	3.990.000	18,17	25,00
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	160.000.000	49.635.900	31,02	32,00
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	159.000.000	61.810.000	38,87	39,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.226.075.000	78.247.981	6,38	14,00
14	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100.000.000	-	-	-
15	Pengadaan peralatan gedung kantor	100.000.000	-	-	-
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	78.905.000	-	-	-
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	149.670.000	30.090.981	20,10	30,00
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	47.500.000	9.975.000	21,00	30,00
19	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	750.000.000	38.182.000	5,09	15,00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	311.100.000	208.949.000	67,16	67,66
20	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000	2.225.000	4,45	5,00
21	Rapat koordinasi perencanaan	100.000.000	97.638.100	97,64	98,00
22	Sosialisasi program PM2L	111.100.000	109.085.900	98,19	99,00
23	Pengembangan sumber daya aparatur kesejahteraan sosial	50.000.000	-	-	-
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.000.000	2.850.000	14,25	15,00
24	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	-	-	-
25	Penyusunan RKPD/renja dan laporan kinerja SKPD	10.000.000	2.850.000	28,50	30,00
VI	Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	100.000.000	-	-	-
26	Ekspose Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	100.000.000	-	-	-
VII	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	200.000.000	50.422.175	25,21	27,50

27	<i>Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya</i>	100.000.000	47.221.775	47,22	50,00
28	<i>Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin</i>	100.000.000	3.200.400	3,20	5,00
VIII	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.645.725.000	296.807.450	11,22	11,48
29	<i>Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</i>	75.000.000	-	-	-
30	<i>Kegiatan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan anak dan wanita rawan sosial ekonomi di PSBRKW</i>	1.000.000.000	177.349.200	17,73	18,00
31	<i>Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga</i>	76.625.000	8.040.000	10,49	13,00
32	<i>Pembangunan Sarana Panti Sosial</i>	1.000.000.000	-	-	-
33	<i>Pelayanan Panti Sosial Bina Laras Pabelum</i>	494.100.000	111.418.250	22,55	23,00
IX	Program pembinaan anak terlantar	50.000.000	43.966.200	87,93	90,00
34	<i>Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar</i>	50.000.000	43.966.200	87,93	90,00
X	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	87.500.000	15.755.000	18,01	20,00
35	<i>Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma</i>	87.500.000	15.755.000	18,01	20,00
XI	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	1.200.000.000	328.487.000	27,37	29,00
36	<i>Pelayanan sosial bagi penghuni panti asuhan/panti jompo</i>	1.200.000.000	328.487.000	27,37	29,00
XII	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	494.666.000	225.203.868	45,53	45,81
37	<i>Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial</i>	74.666.000	8.129.868	10,89	11,00
38	<i>Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial</i>	420.000.000	217.074.000	51,68	52,00
XIII	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	512.900.000	97.933.200	19,09	21,45
39	<i>Pembinaan manajer sosial kecamatan/tenaga kesejahteraan sosial kecamatan</i>	80.000.000	35.866.200	44,83	45,00
40	<i>Pemberdayaan organisasi sosial</i>	42.900.000	-	-	-
41	<i>Pemberdayaan Karang Taruna</i>	50.000.000	3.920.000	7,84	10,00
42	<i>Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial</i>	240.000.000	42.697.000	17,79	20,00
43	<i>Fasiltasi KOMDA lansia</i>	100.000.000	15.450.000	15,45	21,00
XIV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	699.837.000	107.189.950	15,32	22,18
44	<i>Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Sosial Bagi PMKS</i>	399.837.000	78.040.000	19,52	30,00
45	<i>Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)</i>	75.000.000	10.483.950	13,98	15,00
46	<i>Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana Sosial</i>	75.000.000	-	-	-
47	<i>Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center</i>	150.000.000	18.666.000	12,44	16,00
	J U M L A H	9.450.490.000	1.977.807.751	20,93	23,22

Pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya adalah :

❑ Tujuan 1 : Terwujudnya efektivitas penanganan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Program		Indikator Kinerja		Kelompok Sasaran
1		2		3
1.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1.	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapat bantuan sosial	200 KK Fakir Miskin
		2.	Jumlah Petugas petugas dan pendamping sosial, pemberdayaan FM yang mendapat bimbingan pelatihan	200 orang
		3.	Jumlah warga KAT yang mendapatkan tempat tinggal yang layak	-
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	160 orang
		2.	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 orang
		3.	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi di Panti Sosial Tresna Werdha	100 orang Lanjut Usia terlantar
		4.	Jumlah lanjut usia terlantar dalam keluarga yang mendapatkan pelayanan sosial	100 orang
		5.	Jumlah Anak Terlantar dan WRSE yang mendapatkan pelayanan di Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita	120 orang anak terlantar dan WRSE

❑ Tujuan 2 : Terwujudnya kemitraan dan aktualisasi potensi Kapital sosial yang melembaga dalam penanggulangan masalah sosial

Program		Indikator Kinerja		Target
1.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.	Jumlah Karang taruna yang diberdayakan dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial	50 Karang Taruna
		2.	Jumlah LSM dan Organisasi yang diberdayakan dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial	60 Orang
		3.	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang diberdayakan dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial	35 org
		5.	Jumlah kegiatan pendayagunaan KOMDA Lansia	1 Laporan
		7.	Jumlah generasi muda yang mengikuti kegiatan pelestarian nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	2000 orang

□ Tujuan 3 : Terwujudnya inisiatif, prakarsa dan kebijakan antisipasi Bencana Alam dan Sosial

Program		Indikator Kinerja		Target
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.	Jumlah lokasi yang mendapatkan bantuan tanggap darurat	14 kab/kota
		2.	Jumlah lokasi yang mendapatkan bantuan bagi korban bencana sosial	14 kab/kota
		3.	Jumlah Lokasi yang mendapatkan pendampingan kegiatan PKH	14 lokasi
		4.	Jumlah lokasi pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial	1 Laporan
		5	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan di Trauma Center	23 Orang

Secara keseluruhan, target pelaksanaan Renja Tahun 2017 khususnya yang bersumber dana APBD sampai dengan Bulan April 2017 dapat tercapai, dan dapat diketahui dari pencapaian fisik sebagai berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017
Provinsi Kalimantan Tengah

1	2	3	4	5			8	9	
				Target Renja 2016	Realisasi Renja 2016	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program s/d 2017	Tingkat Capaian realisasi target Renstra
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA									
PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA	Terpenuhinya informasi Peningkatan Kemampuan Petugas & Pendamping Sosial, Pemberdayaan FM.	198	78 org 4 lok	78 org 4 lok	78 org 4 lok	100%	15 org	100%	7,58

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG USAHA BAGI KELUARGA MISKIN	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapat bantuan	1320	12 klp	12 klp	12 klp	100%	30	100%	2,27
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL						100%		100%	
PELAKSANAAN KIE KONSELING DAN KAMPANYE SOSIAL BAGI PMKS	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Kampanye sosial	20	2 lok	2 lok	2 lok	100%	2 lok	100%	10
PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA REHSOS BAGI PMKS	Jumlah panti yang direhabilitasi								
BIMBINGAN SOSIAL DAN KETRAMPILAN PBK BAGI AT DAN WRSE DI PSBRKW	Terpenuhinya Bimbingan anak terlantar dan wanita rawan sosial ekonomi di PSBRKW	720 org	120 org	120 org	120 org	100%	100 org	100%	14
PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA DALAM KELUARGA	Terlaksananya pelayanan sosial lanjut usia di dalam keluarga	840	80 org	80 org	80 org	100%	30 org	100%	4
PEMBANGUNAN SARANA PANTI SOSIAL	<i>Terbangunnya Gedung Panti Sosial eks psikotik 1 Unit</i>	<i>10 unit</i>	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%	10

PELAYANAN PANTI SOSIAL BINA LARAS PAMBELUM	<i>Terlaksananya pelayanan bagi penyandang eks psikotik di dalam panti</i>	210 org	10 orang	10 orang	10 orang	100%	10 org	100%	5
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR									
PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETRAMPILAN ANAK TERLANTAR	Meningkatnya kesejahteraan sosial anak terlantar	180 org	30 Org	30 org	30 or	100%	30	100%	17
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA									
PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA	Meningkatnya kesejahteraan sosial para penyandang cacat dan trauma	180 org	130 org	130 org	130 org	100%	20 org	100%	11
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /PANTI JOMPO									
PELAYANAN SOSIAL BAGI PENGHUNI ASUHAN /PANTI JOMPO	Meningkatnya kesejahteraan sosial lanjut usia yang dilayani di PSTW Sinta Rangkang	600 org	100 org	100 org	100 org	100%	100 org	100%	17

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT LAINNYA)									
Pemberdayaan eks penyakit sosial	Penyaluran Bantuan berusaha eks penyakit sosial	480 org (2 Keg)	120 Org	120 Org	120 Org	100%	50 org	100%	25
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL	terlaksananya bimtek berusaha eks penyakit sosial	480 org (2 Keg)	80 Org	80 Org	80 Org	100%	40 org	100%	25
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL									
PEMBINAAN MANAJER SOSIAL KECAMATAN / TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)	Meningkatnya kualitas kerja Manager Sosial Kecamatan/TKSK	210 org	35 Org	35 Org	35 Org	100%	4 TKSK	100%	11
PEMBERDAYAAN ORGANISASI SOSIAL	Meningkatnya kemampuan Organisasi sosial/Orsos dalam pembangunan kesejahteraan sosial	180 orsos	60 orsos	60 orsos	60 orsos	100%	2 orsos	100%	3
PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA	Meningkatnya kemampuan KT dlm Kesos	120 KT	50 KT	50 KT	50 KT	100%	15 KT	100%	30

PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KEJUANGAN & KSN.	Meningkatnya pemahaman masyarakat thdp nilai-nilai K2KS	600 org	1200 org	1200 org	1200 org	100%	280 org	100%	47
FASILITASI KOMDA LANSIA	Meningkatnya peran Komda Lansia	5 PKT	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	100%	20
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									
FASILITASI PELAYANAN BANTUAN PADA PMKS	Tertanganinya para penyandang masalah sosial	1600 org	100 org	100 org	100 org	100%	100 org	100%	6,25
PENINGKATAN DAN AKSES KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT (PKH)	Meningkatnya pemahaman dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Bagi Masyarakat	179 org	13 Kab/ Kota	13 Kab/ Kota	13 Kab/ Kota	100%	13 org	100%	7,26
PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DANA	Terpenuhinya perijinan Penyelenggaraan Undian Berhadiah	60 keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	5 keg	100%	8,33
PERLINDUNGAN SOSIAL PMKS DI TRAUMA CENTER	Terpenuhinya pelayanan sosial di trauma center	150 org	25 org	25 org	25 org	100%	25 org	100%	16,67
PEMBINAAN KAMPUNG SIAGA BENCANA (KSB)	<i>Terlaksanannya Bimtek Bagi TAGANA, Tokoh Masyarakat dan Pengerahan Massa untuk Penanganan Bencana</i>	4600 org	600 org	600 org	600 org	100%	0	100%	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Mengacu **Peraturan Menteri Sosial RI tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)** Peraturan Menteri Sosial NOMOR : 129 / HUK / 2008 TENTANG Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 41 Tahun 2013 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian SPM Bidang Sosial dapat disampaikan beberapa kinerja pelayanan sebagai berikut yaitu :

1. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial

- a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Skala Provinsi yang memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala provinsi sudah dapat mencapai target dalam setiap tahunnya Tahun 2011 dari target 16% Capaian target 20%, Tahun 2012 Target 16% capaian target (29,82%), Tahun 2013 target 16% capaian target 26%, Tahun 2014 Target 16% capaian target 20,9%, Tahun 2015 target 16% capaian target 18,46% , tahun 2016 target 18% capaian target 72,57% dengan demikian target SPM dapat melampaui dan Tahun 2017 target 20% untuk capaian dengan sampai bulan april 2017 capaian target 23%.
- b. Panti Sosial Skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.
Panti sosial skala provinsi yang ada sebanyak 2 panti yang dimiliki oleh pemerintah, dari target capaian setiap tahunnya sebesar 33% dapat tercapai sebesar 100%.

2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial

- a. Panti Sosial Skala Provinsi yang menyediakan sarana pelayanan kesejahteraan sosial.
Pelayanan ini dapat terlaksana dengan baik khususnya untuk panti pemerintah yang berjumlah 2 buah, sementara untuk panti swasta, Dinas Sosial telah memberikan pelayanan dasar, dari target tahunan sebesar 33% dapat terlampaui 100%.
- b. Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.
Dari target capaian setiap tahunnya 14% dapat tercapai sebesar 24,28% atau dari target 18 panti setiap tahunnya sudah terdapat 73 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial.

3. Penanggulangan korban bencana

- a. Kabupaten/Kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.

Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi setiap bencana alam yang terjadi, selalu ditindaklanjuti sesuai dengan aturan, dengan melakukan koordinasi dengan pihak kabupaten lokasi bencana dan infrastruktur yang telah tersedia di masyarakat seperti TAGANA. Demikian juga dengan proses evakuasi korban bencana. Secara berkala Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menguasai langkah evakuasi secara profesional, namun program penanggulangan bencana melalui anggaran APBD sejak tahun 2013 dihilangkan, karena penanggulangan bencana sifatnya tidak terduga maka penganggaran harus melalui badan keuangan daerah melalui anggaran kegiatan tidak terduga, sehingga program bantuan penanggulangan bencana yang ada pada Dinas Sosial dihilangkan, disamping itu kejadian bencana skala provinsi hanya terjadi 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun sehingga pencapaian target sebesar 14% tidak tercapai dan hanya mencapai 0%.

- b. Kabupaten/Kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi.

Dalam kurun waktu satu tahun di Kabupaten/Kota tidak terjadi bencana skala provinsi sehingga tidak memerlukan tanggap darurat, dari target capaian setiap tahunnya sebesar 14% tidak tercapai 0%,

4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, mental serta lanjut usia tidak potensial.

Bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial Pelayanan bagi penyandang cacat masih sangat terbatas, setiap tahun anggaran hanya tersedia dana untuk 25 orang per tahun dari APBD sedangkan populasi cukup tinggi, sehingga pelayanan sosial untuk penyandang masalah ini masih sangat kecil, penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi yang dilaksanakan sudah mencapai 20 %. Dengan target sebesar 15% sehingga pelayanan bidang ini dapat mencapai target. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.1
**Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Sosial
 Provinsi Kalimantan Tengah**

NO	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	Tar get IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Poyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
I	SPM SOSIAL															
1.	Presentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar															
	a. Presentase (%) Fakir Miskin skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial	80 %		16%	20%	20%	20%	20%	17 %	20 %	20%	20%	20%	30%	30%	
	b. Presentase (%) panti sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan Kesos	60 %		33%	33%	33%	33%	33%	17 %	20 %	20%	20%	20%	30 %	30 %	

2.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial															
	a. Presentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos;	80 %		20%	20%	33%	33%	33%	17 %	20 %	20%	20%	20%	30%	30%	
	b. Presentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos luar panti	60 %		15 %	15 %	14%	14%	14%	17 %	20 %	20%	20%	20%	30 %	30 %	
3.	Penanggulangan korban bencana															
	a. Presentase (%) Kabupaten/Kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.	80 %		20 %	20 %	21%	29%	14%	17 %	20 %	20%	20%	20%	30%	30%	
	b. Presentase (%) Kabupaten/Kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi.	80 %		20 %	20 %	21%	29%	14%	17 %	20 %	20%	20%	20%	30 %	30 %	
4.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial															
	a. Presentase (%) Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	40 %		10 %	10 %	14 %	14 %	14 %	17 %	20 %	20%	20%	20%	30 %	30 %	

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan peningkatan kinerja hal ini terlihat dari adanya peningkatan target sasaran dan jumlah anggaran pada setiap tahunnya, peningkatan tersebut dilatarbelakangi adanya permasalahan sosial yang segera mendapatkan penanganan atau percepatan penanganan, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tidak berlarut-larut dan menunggu, sehingga penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat segera melepaskan permasalahan yang dihadapi,

Permasalahan yang menjadi perhatian adalah penanggulangan kemiskinan terutama bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil. Program sebelumnya hanya didukung oleh anggaran APBN, karena jangkauan pelayanannya yang sangat terbatas maka diupayakan penambahan oleh anggaran APBD dengan kegiatan penyediaan rumah warga KAT sebanyak 15 unit, sehingga diharapkan percepatan penanganan dapat terlaksana.

Dalam pelaksanaan program terutama dalam penanganan permasalahan tersebut diatas menunjukkan hasil yang positif, hal ini dapat dilihat dari perubahan pola kehidupan masyarakat yang sebelumnya bertempat tinggal di rumah yang tidak layak setelah diberdayakan mereka dapat hidup lebih layak dan dapat merubah pola kehidupannya yang lebih baik.

Begitu juga dalam pemberdayaan fakir miskin, yang sebelumnya tidak memiliki lapangan kerja, dengan adanya pemberian bantuan usaha ekonomis produktif melalui Kelompok Usaha Bersama, mereka dapat menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial juga mendapatkan perhatian dan percepatan terutama peningkatan sarana dan prasarana panti sosial yang memenuhi standar pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial.
 - Terbatasnya cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial.

- Masih adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota.
- Masih belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya.
- Masih banyaknya desa/kelurahan tertinggal yang belum tertangani secara optimal
- Semakin kompleksitasnya permasalahan kesejahteraan sosial, yang memerlukan penanganan secara terus menerus dalam rangka menekan timbulnya permasalahan baru.
- Semakin meluas dan meningkatnya pengguna Napza, sehingga diperlukan panti rehabilitasi NAPZA Provinsi, panti swasta yang ada sudah tidak mampu lagi menampung para korban NAPZA.

Selama ini keberadaan Tata Ruang Wilayah berpengaruh besar pada kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial khususnya pemberdayaan komunitas adat terpencil, sehingga belum terbitnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah mengganggu penerbitan akta tanah bagi warga KAT. Diharapkan nanti setelah terbitnya RTRWP Kalimantan Tengah, kegiatan sertifikasi tanah bagi warga KAT bisa dilaksanakan sehingga status kepemilikan tanah bagi warga KAT sah secara hukum.

Dalam upaya percepatan penanganan permasalahan tersebut diatas, diperlukan kebijakan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dan juga tidak kalah pentingnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

b. Permasalahan, hambatan dan Tantangan

- Belum terlaksananya pendataan secara baik dan benar di setiap wilayah Kabupaten mengingat tidak adanya struktur dan lembaga yang khusus menangani bidang sosial di Kabupaten-Kabupaten, walaupun ada merupakan lembaga yang baru dan beraneka ragam menyebabkan tidak tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat sebagai dasar perencanaan penyusunan program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

- Rendahnya pengetahuan/pendidikan ketrampilan Keluarga Binaan Sosial dalam mengelola Kelompok Usaha Bersama (KUBE), sehingga kurang memiliki rasa tanggung jawab maupun kebersamaan sehingga sulit berkembang.
- Organisasi Sosial sebagai pilar partisipasi sosial masyarakat dalam melaksanakan penyantunan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada umumnya masih tergantung pada pemerintah belum mampu mandiri.
- Penyuluhan Sosial sebagai gerak dasar pembangunan Kesejahteraan Sosial belum diimbangi dengan kualitas/kwantitas tenaga penyuluh dan belum terpadunya pelaksanaan penyuluhan.
- Meningkatnya permasalahan sosial disatu pihak dan keterbatasan kemampuan pada Dinas Sosial seperti keterbatasan dana APBD, tenaga pegawai, sarana dan prasarana, organisasi serta kelembagaan di Kabupaten/Kota yang nomenklaturnya berbeda-beda merupakan suatu permasalahan.
- Keterpaduan perencanaan program dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Propinsi dan Pusat sebagai proses botom up planing untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah belum maksimal.
- Dukungan dana pendamping APBD Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dibiayai dari dana APBN maupun APBD Propinsi masih terbatas.
- Permasalahan Sosial yang menonjol di Propinsi Kalimantan Tengah adalah kemiskinan, dari permasalahan ini mengakibatkan berbagai permasalahan Kesejahteraan Sosial antara lain seperti keterlantaran, ketunaan sosial, tindak kekerasan dan lingkungan sosial yang kumuh dan rawan sosial, kemudian keterpencilan/keterasingan disebabkan faktor geografi dan sulitnya transportasi.
- Penyebaran penduduk yang tidak merata dan sulitnya kondisi geografis serta transportasi menyebabkan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial belum dapat merata menjangkau seluruh masyarakat.

- Faktor penyebaran penduduk yang tidak merata dan rumah/tempat tinggal penduduk yang berjauhan menghambat kerjasama dalam mengelola bantuan secara kelompok.
- Sebagian pemerintah Kabupaten/Kota belum melihat pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai suatu hal yang penting dibanding dengan bidang lain, hal ini dapat dilihat dari komitmen untuk membentuk kelembagaan yang menangani permasalahan sosial di daerah maupun alokasi dana yang disediakan untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Peran dunia usaha melalui program CSR belum banyak menyentuh pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, sehingga perlu didorong dalam rangka mengoptimalkan CRS dalam bidang sosial.

c. Hambatan dalam melaksanakan visi dan misi sesuai tupoksi.

- Dalam setiap pencapaian target yang ingin di capai dalam jangka waktu tertentu, sering tidak dapat dicapai sesuai rencana. Hal ini sering terjadi adanya kebijakan baru yang menyebabkan program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan, seperti adanya kebijakan penanganan korban bencana yang merupakan kejadian tidak terduga sehingga tidak dapat dialokasikan dalam rencana kerja.
- Kondisi geografis Kalimantan Tengah terutama dalam penanganan permasalahan sosial di desa tertinggal atau sangat tertinggal yang rata-rata berada di daerah terpencil / sulit dijangkau, sehingga memerlukan pembiayaan operasional yang cukup besar, disatu sisi anggaran yang dialokasikan sangat terbatas, sehingga dalam penanganannya selalu menjadi pertimbangan.

d. Peluang.

- Terbitnya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah memberikan angin segar bagi pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial karena dalam Undang Undang dimaksud berbagai perkembangan permasalahan sosial dan upaya pemecahannya telah disesuaikan dengan kondisi terkini masyarakat Indonesia.

- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tanggal 6 November 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota akan memberikan arah yang lebih baik dan terukur bagi pelaksanaan Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di daerah.
- Terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 111/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial akan memberikan acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
- Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antar Dinas Sosial dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan intern Dinas Sosial diharapkan mampu mewujudkan yang lebih integratif.
- Dukungan infra struktur PSM, Karang Taruna, Orsos, Relawan Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Tokoh Masyarakat maupun lembaga masyarakat, akan sangat membantu dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- Adanya kebijakan daerah terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial menjadikan suatu prioritas baik secara nasional maupun daerah.

e. Penentuan Isu-isu Strategis

- Terbuka dan semakin lancarnya transportasi darat dari ibukota provinsi ke 13 kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah akan mempermudah proses pembangunan kesejahteraan sosial secara merata.
- Terbuka dan semakin lancarnya transportasi darat antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah juga membawa dampak negatif diantaranya mudahnya terjadi perpindahan PMKS tertentu antar provinsi dan antar Kabupaten/Kota, misalnya untuk PMKS Tuna Susila dan Pengemis.
- Dengan berkembangnya perusahaan besar perkebunan sawit dan pertambangan, tidak hanya berdampak positif, tetapi juga dapat berdampak sosial bagi masyarakat, terutama masalah ketenagakerjaan dan lahan masyarakat yang menjadi sengketa, sehingga berpotensi konflik sosial.

2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Salah satu program prioritas yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah program penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang menunjukkan bahwa sebagian warga negara berada dalam kondisi ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehingga di perlukan intervensi pemerintah untuk dapat menanggulangi permasalahan tersebut.

Populasi masyarakat miskin yang sesuai dengan kriteria sasaran pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah diperkirakan berjumlah 138.463 orang yang tersebar di 14 kab/kota. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah apabila tidak dilakukan penanggulangan secara terintegrasi dengan melibatkan komponen yang ada, baik pemerintah maupun masyarakat.

Pada saat ini Dinas Sosial melaksanakan program kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi geografis yang ada yaitu penanggulangan kemiskinan perdesaan dan penanggulangan kemiskinan perkotaan. Secara substansi, kedua program tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu memberdayakan masyarakat miskin supaya dapat memperoleh kebutuhan dasarnya secara mandiri dan berkelanjutan. Faktor yang membedakan adalah penyesuaian penggunaan stimulan yang diarahkan kepada potensi yang ada di lingkungan mereka. Daerah perkotaan lebih berorientasi kepada usaha industri dan pedesaan usaha pertanian.

Namun demikian, program-program tersebut belum dapat diakses secara merata oleh masyarakat miskin. Populasi yang cukup banyak dan keterbatasan dana pemerintah merupakan kendala utama dalam pemerataan program kemiskinan di Kalimantan Tengah. Sebagai gambaran jangkauan program, pada tahun 2017 ini, jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan melalui program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 1700 KK atau sekitar 5,8 persen dari populasi yang ada. Dari jumlah tersebut dibiayai oleh APBN dan sebanyak 200 KK dibiayai oleh APBD. Setidaknya diperlukan waktu sekitar 15 sampai 20 tahun lagi agar penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Tengah dapat menjangkau seluruh populasi yang ada.

Dari data diatas juga dapat menggambarkan bahwa terdapat ketidak seimbangan dalam kontribusi sasaran antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan dana.

Kondisi ini harus mendapat perhatian semua stakeholder yang ada di pemerintah Kalimantan Tengah baik dari eksekutif maupun legislatif. Permasalahan program kemiskinan diposisikan sebagai prioritas program dengan indikator yang terukur dan mendapat dukungan secara penuh baik dari sisi kebijakan maupun pendanaannya. Dengan demikian diharapkan program akan lebih bersifat terintegrasi dan terfokus kepada penyelesaian masalah kemiskinan secara menyeluruh dan menghasilkan suatu kondisi sejahtera yang diharapkan masyarakat dan pemerintah.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan system perencanaan nasional diusulkan melalui Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi, namun penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sering tidak muncul dalam usulan Musrenbang, sedangkan yang sering diusulkan hanya yang bersifat fisik dan yang menjadi prioritas saja, sehingga, dalam penyusunan renja mengacu pada data yang tersedia setelah dilakukan verifikasi data.

Disamping itu penentuan sasaran juga didasarkan atas hasil kajian data yang dilakukan, seperti dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil, yang datanya diperoleh melalui penjajagan dan studi kelayakan, sedangkan untuk pemberdayaan fakir miskin dilakukan melalui pemetaan kantong-kantong kemiskinan dengan melakukan verifikasi data PPLS 2011.

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2018
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

N O	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan jasa surat menyurat	P. Raya	Jumlah Surat yang didistribusikan	1000 Benda Pos	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	P. Raya	Jumlah gedung yang mendapat fasilitas komunikasi, air dan listrik, telpon/internet (penambahan daya listrik kantor dinas	5 Gedung	
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	P. Raya	Jumlah bangunan gedung kantor yang mendapatkan asuransi	6 Gedung	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	P. Raya	Jumlah tenaga pengelola keuangan /barang Penata Usahaan Administrasi Keuangan, cleaning service dan SATPAM yang mendapat Honorarium	37 orang	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	P. Raya	Jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan kebersihan	1 Gedung	
	Penyediaan alat tulis kantor	P. Raya	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 Lap	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	P. Raya	Jumlah barang cetakan yang tersedia	2.825 Exsmplr	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	P. Raya	Jumlah gedung yang mendapat pasokan listrik	1 gedung	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	P. Raya	Jumlah Peralatan Keterampilan yang tersedia di panti PSBRKW 1 Paket	16 Unit	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	P. Raya	Jumlah pegawai dan dapat mengakses informasi melalui media cetak	23000 Exsmplr	
	Penyediaan makanan dan minuman	P. Raya	Jumlah rapat dinas internal yang dilaksanakan	1085 Kotak	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan di luar daerah	24 Kali	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dalam Daerah	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan di dalam daerah	53 Kali	
	Rujukan Berobat PNS	P. Raya	Jumlah Rujukan Berobat PNS	3 Orang	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	P. Raya	Jumlah perlengkapan yang diperlukan	10 Unit	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	P. Raya	Jumlah gedung yang memperoleh peralatan	20 Unit	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	P. Raya	Jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan	1 Gedung	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	P. Raya	Jumlah kendaraan yang mendapat perawatan	9 unit	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	P. Raya	Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	5 unit	

	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	P. Raya	Jumlah gedung yang direhabilitasi	5 Unit	
--	---	---------	-----------------------------------	--------	--

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	P. Raya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	127 Unit	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	Pendidikan dan pelatihan formal	P. Raya	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	42 Orang	
	Rapat Koordinasi perencanaan	P. Raya	Jumlah kegiatan rapat kerja teknis	1 Laporan	
	Sosialisasi Program PM2L dan PMKS	14 kab/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi PM2L	1 Laporan	
	Pengembangan Sumberdaya Aparatur Kesejahteraan Sosial	P. Raya	Jumlah Aparatur yang mendapatkan pengembangan kapasitas	1 Laporan	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	P. Raya	Jumlah laporan capaian kinerja	7 laporan	
	Penyusunan RKPD/Renja dan laporan kinerja SKPD	P. Raya	jumlah laporan rencana kerja	7 laporan	
6	Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)				
	Ekspose Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	P. Raya	Jumlah Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	
7	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang				

	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah petugas dan pendamping sosial fakir miskin yang mendapat bimtek.	25 orang	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (PM2L)	Prov. Kalteng	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan sarana dan prasarana pendukung usaha	250 KK	
8	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Barut	Jumlah lokasi yang mendapatkan informasi program \Kesos	50 orang	
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi pmks	Prov. Kalteng	Jumlah gedung panti yang direhabilitasi	5 Unit	
	Kegiatan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan anak dan wanita rawan sosial ekonomi	Kota Palangka Raya	Jumlah anak dan wanita rawan sosial ekonomi yang mendapat bimbingan sosial di PSBRKW	100 Orang	
	Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga	Prov. Kalteng	Jumlah Lanjut Usia yang mendapat pelayanan dan asistensi sosial	25 orang	
	Pembangunan sarana Panti Sosial	P. Raya	Jumlah Gedung yang dibangun	2 Unit	
	Pelayanan Panti Sosial Bina Laras Pabelum	P. Raya	Jumlah Klien yang mendapatkan pelayanan	10 Orang	
7	Program pembinaan anak terlantar				
	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Prov. Kalteng	Jumlah anak yang berkesempatan mengembangkan bakat dan keterampilan	15 org	
8	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma				

	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Prov. Kalteng	Jumlah penyandang cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan pelayanan	65 Orang	
9	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo				
	Pelayanan sosial bagi penghuni panti asuhan/panti jompo	P. Raya	Jumlah lanjut usia yang memperoleh pelayanan sosial dan jadup (jaminan hidup)di PSTW Sinta Rangkang	85 orang	
10	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)				
	Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial	Prov. Kalteng	Jumlah Korban Napza yang diberdayakan	1 Laporan	
	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Palangka Raya	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan berusaha	40 Orang	
11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				
	Pembinaan manajer sosial kecamatan/ tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	14 Kabupaten/ Kota	Jumlah manajer sosial kecamatan/tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang mendapat Bimbingan Teknis	35 Orang	
	Pemberdayaan Organisasi Sosial	P. Raya	Jumlah Organisasi Sosial yang diberdayakan	60 orang	
	Pemberdayaan Karang Taruna	P. Raya	Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan	15 org	
	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	P. Raya	Jumlah masyarakat yang memahami nilai-nilai kepahlawanan,	1 Laporan	

			keperintisan dan keseiakawanan sosial		
	Fasilitasi KOMDA lansia	P. Raya	Jumlah kegiatan fasilitasi pelayanan yang dilaksanakan	1 Dokumen	
12	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
	Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Sosial Bagi PMKS	14 Kabupaten/kota	Jumlah lokasi PMKS yang mendapatkan bantuan sosial	100 Org	
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat	14 Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi kab/kota yang mendistribusikan program PKH	14 Laporan	
	Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana Sosial	Kota Palangka Raya	Jumlah pengawasan penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan sosial yang di laksanakan	1 Laporan	
	Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center	P. Raya	Jumlah Klien yang mendapatkan perlindungan di Trauma Center	25 Org	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan pembangunan nasional bidang kesejahteraan sosial sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, ditegaskan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial diprioritaskan pada keadaan yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yaitu : 1) kemiskinan, 2) ketunaan, 3) kecacatan, 4) keterlantaran, 5) ketunaan sosial/ penyimpangan perilaku, 6) korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

Masalah kemiskinan merupakan program prioritas secara nasional, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah, oleh karena itu dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, mengacu pada kebijakan nasional maupun kebijakan daerah, sehingga pembangunan bidang kesejahteraan sosial harus dilaksanakan sinergis dan terintegrasi.

Disamping masalah kemiskinan masalah-masalah lainnya yang mengarah pada upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut di atas, juga menjadi prioritas pembangunan nasional, maka penanganan masalah tersebut juga menjadi tujuan dan sasaran program pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan yang sudah menjadi program nasional, Kalimantan Tengah tahun 2018 mendapatkan alokasi kegiatan di 14 Kabupaten/Kota, sehingga memerlukan dukungan dana pendamping dari provinsi dan kabupaten/kota.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Tujuan yang ingin diwujudkan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai dengan rencana target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.
2. Terwujudnya kemitraan dan aktualisasi potensi Kapital sosial yang melembaga dalam penanggulangan masalah sosial, baik dengan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka percepatan pencapaian target SPM.
3. Terwujudnya inisiatif, prakarsa dan kebijakan dalam rangka penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Adapun sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran tujuan dimaksud adalah:

Tujuan Pertama : Terwujudnya efektivitas penanganan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Sasaran 1 :

Melaksanakan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :

- 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Panti Sosial Tresna Werdha
- 2) peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita
- 3) pembinaan dan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial/Pemberdayaan Fakir Miskin
- 4) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
- 5) Peningkatan kesejahteraan sosial keluarga/Pemberdayaan Keluarga
- 6) Penyediaan dokumen perencanaan yang komprehensif mengenai kesejahteraan sosial masyarakat di Kalimantan Tengah/Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan

Sasaran 2 :

Melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial melalui program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :

- 1) Rehabilitasi Tuna Sosial
- 2) Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
- 3) Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia
- 5) Pembinaan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak terlantar
- 6) Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak cacat
- 7) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dan rehabilitasi anak nakal

Tujuan Kedua : Terwujudnya kemitraan dan aktualisasi potensi Kapital sosial yang melembaga dalam penanggulangan masalah sosial

Sasaran :

Melaksanakan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial melalui program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Karang Taruna dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial
- 2) Pemberdayaan LSM dan Organisasi Sosial dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial
- 3) Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial

- 4) Kerjasama lintas sektor dan dunia usaha dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
- 5) Pendayagunaan sumber dana sosial
- 6) Pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat
- 7) pelestarian nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan social

Tujuan Ketiga : Terwujudnya inisiatif, prakarsa dan kebijakan antisipasi Bencana Alam dan Sosial

Sasaran :

Melaksanakan Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial melalui program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan pencarian dan penyelamatan musibah bencana alam dan bencana lainnya (SAR)
- 2) Pemberdayaan korban bencana sosial
- 3) Perlindungan sosial tindak kekerasan dan pekerja migran
- 4) Akses jaminan sosial

Agar lebih jelas dapat dilihat pada table 4.1. berikut :

**BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2018 berdasarkan sumber dana APBD Provinsi adalah ;

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat
		2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
		4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
		5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
		6 Penyediaan alat tulis kantor
		7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		11 Penyediaan makanan dan minuman
		12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
		13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
		14 Rujukan berobat PNS
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
		2 Pengadaan peralatan gedung kantor
		3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
		6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan pelatihan formal
		2	Rapat Koordinasi perencanaan
		3	Sosialisasi Program PM2L dan PMKS
		4	Pengembangan Sumberdaya Aparatur Kesejahteraan Sosial
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD
		2	Penyusunan RKPD/Renja dan laporan kinerja PD
6	Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	1	Ekspose Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
7	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
		2	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
8	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		2	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
		3	Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan anak dan wanita rawan sosial ekonomi
		4	Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga
		5	Pembangunan sarana Panti Sosial
		6	Pelayanan Panti Sosial Bina Laras Pabelum
9	Program pembinaan anak terlantar	1	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar

10	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	1	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
11	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	1	Pelayanan sosial bagi penghuni panti asuhan/panti jompo
12	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	1	Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial
		2	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
13	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	Pembinaan manajer sosial kecamatan/ tenaga kesejahteraan sosial kecamatan
		2	Pemberdayaan Organisasi Sosial
		3	Pemberdayaan Karang Taruna
		4	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial
		5	Fasilitasi KOMDA lansia
14	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Sosial Bagi PMKS
		2	Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
		3	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana Sosial
		4	Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center
		5	Pembinaan Kampung siaga bencana

Program dan kegiatan tersebut diatas telah sejalan dengan visi dan misi pembangunan lima tahun terutama dalam pencapaian target SPM yang telah ditetapkan, disamping itu program kegiatan juga diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan pemberian bantuan usaha ekonomis produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBE) sesuai dengan ketrampilan dan potensi yang dimiliki oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Salah satu program yang terkait dengan pengembangan daerah terisolir, yaitu melalui pemberdayaan Komunitas Adat terpencil dengan kegiatan penjajagan awal calon lokasi KAT dan pemberian bantuan rumah bagi warga KAT. Anggaran yang dialokasikan melalui APBD merupakan dana pendukung APBN yang jumlahnya cukup besar disbanding anggaran APBD.

Rencana kerja (Renja) Tahun 2018 terdiri dari 14 program meliputi 51 kegiatan, dengan penyebaran lokasi di seluruh Kabupaten/Kota serta kegiatan yang bersifat pelayanan sosial dipanti Sosial yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang memerlukan anggaran yang cukup besar.

Adapun total kebutuhan dana yang diusulkan sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.1 berikut ini.

BAB V PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Secara umum, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah berusaha merencanakan Program dan Kegiatan yang menjadi penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsinya. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam tahun anggaran 2018. Dengan berpedoman pada Rencana Kerja ini diharapkan kedepan, kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditingkatkan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Palangka Raya, September 2017
Kepala Dinas,

Drs. SUHAEMI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640905 199303 1 001